BKPSDM KAB. ASAHAN

RENCANA KERJA

TAHUN 2024



Email :
bkpsdm@asahankab.go.id
Website :
https://bkpsdm.asahankab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Jenderal Sudirman No.5 K I S A R A N - 2 1 2 1 6
Email : bkpsdm@asahankab.go.id website : https://bkpsdm.asahankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 800.1.4.4 /0891 /BKPSDM /VII /2023

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ASAHAN TAHUN 2024.

KESATU : Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renja Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN.
2. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
3. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V. PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal : 25 Juli 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ASAHAN,



NAZARUDDIN, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640615 199003 1 011

Tembusan :

Bupati Asahan sebagai laporan

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan tahun 2024 dapat selesai dikerjakan.

Rencana Kerja (RENJA) adalah rencana program dan kegiatan suatu instansi yang disusun untuk satu tahun kedepan, dalam hal ini tahun 2024.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun, yang telah berupaya semaksimal mungkin mencurahkan waktu, perhatian dan segenap kemampuan sehingga penyusunan Rencana Kerja dapat disusun tepat waktu.

Akhirnya kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri seraya berdoa semoga apa yang telah, sedang dan akan kita laksanakan tetap mendapat izin dan ridhoNya. Aamiin.

Kisaran, 26 Juli 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ASAHAN

NAZARUDDIN, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640615 199003 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II. EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kab. Asahan Tahun lalu dan Capaian Renstra BKPSDM Kab. Asahan 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kab. Asahan 22

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kab. Asahan 32

2.4 Review terhadap Awal RKPD 33

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **36**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kab. Asahan 36

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...37

BAB V. PENUTUP ..... **...38**

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 15
2. Tabel 2.1.2 Capaian Indikator Kinerja 15
3. Tabel 2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan 16
4. Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan 23
5. Tabel 2.2.2 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2022 30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, good governance and clean government terus berkembang dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas, dan demokratis.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) OPD

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan menyusun rencana kerja (Renja) OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Renja tahun 2024 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2024 dengan tambahan ataupun perubahan nama kegiatan serta beberapa sub-sub kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, meliputi: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Proses Penyusunan Renja OPD

Proses penyusunan Renja OPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 129 disajikan dengan sistematika :

a. Pendahuluan
b. Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu
c. Tujuan dan sasaran perangkat daerah
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah
e. Penutup.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim Renja OPD, orientasi mengenai Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD.

   Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

   Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi OPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing OPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di OPD.

2. Orientasi mengenai Renja OPD.

   Orientasi mengenai Renja OPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja.

   Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja OPD sangat ketat dan padat.Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja OPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

4. Pengumpulan Data dan Informasi.

   Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

   Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut :

   a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.
   b. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
   c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

   Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja OPD, antara lain:

   a. Peraturan perundang-undangan terkait.
   b. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
   c. Dokumen-dokumen.
   d. Dokumen-dokumen RKPD.
   e. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
   f. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
   g. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.

h. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.

i. Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

c. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannnya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki,

yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

d. Proses penyusunan RAPBD

Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja-OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja-OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-OPD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasaan Idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila ;
2. Landasan Konstitusional UUD Negara RI yaitu UUD 1945 ;
3. Landasan Operasional ;

a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

r. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

s. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan pada tahun 2024. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan Perencanaan Pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya :

1. Realisasi program/kegiatan **yang tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan **yang telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan kinerja pelayanan OPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan

dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD Prov dengan OPD kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

- Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan Kabupaten, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM, MDGs

- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan

rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda.

- Catatan penting juga diarahkan terhadap kemungkinan perubahan atau penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja OPD (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra OPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan OPD Kabupaten, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kecamatan yang langsung ditujukan kepada OPD Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan)

- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:

a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal :

- Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun urusan kepegawaian dan kediklatan
- Pencapaian pengembangan digitalisasi birokrasi
- Pencapaian rencana aksi sumber daya manusia.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM KAB. ASAHAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BKPSDM KAB. ASAHAN

Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan yang terealisasi sampai bulan Desember 2022 adalah Rp. 13.050.502.610,- (Tiga Belas Miliar Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) yang terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 36 subkegiatan dengan realisasi sebesar 88,91%.

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Asahan dan penyusunan Perencanaan Program pada BKPSDM Kab. Asahan didasarkan pada Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan adalah membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Indikator Kinerja BKPSDM Kab. Asahan adalah :

- Indeks Profesionalitas ASN
- Cakupan Standar Kompetensi Pegawai
- Nilai SAKIP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 diperoleh tingkat capaian kinerja utama BKPSDM Kabupaten Asahan sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Indikator Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian Kinerja
1	*2*	*3*	*4*
1. *Indeks Profesionalitas ASN*	65%	47,35%	72,85%
2. *Cakupan Standar Kompetensi Pegawai*	71,80%	68,17%	94,94%
3. *Nilai SAKIP*	B (65,40)	B (63,95)	97,78%

Mendukung Indikator Kinerja Utama, dicapai Indikator Kinerja Daerah/Program pada BKPSDM Kabupaten Asahan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah/Program Tahun 2022

Indikator Kinerja Daerah/Program	Target	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian Kinerja
1	*2*	*3*	*4*
1. Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian	100,00%	100,00%	100,00%
2. Persentase Kesesuaian Kompetensi Jabatan	85,00%	88,15%	103,71%
3. Tingkat Pelanggaran ASN yang ditindaklanjuti	90,91%	100,00%	109,99%
4. Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar	5,17%	6,89%	133,27%

Tabel 2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2022 BKPSDM Kabupaten Asahan

NO.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022 (Renja OPD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja OPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(6/5)*	*8*	*9=(6+8)*	*10=(9/4)*
1	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian**							
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**100%**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**34,01%**
	1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	150%	2 Dokumen	3 Dokumen	150%
	2 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	114,29%	14 Dokumen	16 Dokumen	114,29%
	3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	300 Dokumen	336 Dokumen	112%	115,32%	333 Dokumen	384 Dokumen	115,32%
	4 Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
	5 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	100%	19 Dokumen	19 Dokumen	100%
	6 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	100%	19 Dokumen	19 Dokumen	100%
		Persentase Kesesuaian Kompetensi Jabatan							
	Mutasi dan Promosi ASN	**Layanan Mutasi dan Promosi**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**120,99%**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**
	1 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	30 Dokumen	53 Dokumen	176,67%	126,67%	30 Dokumen	38 Dokumen	126,67%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
	2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5850 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	960 Dokumen	1.322 Dokumen	137,71%
	3 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	47 Dokumen	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**157,59%**	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
	Pengembangan Kompetensi ASN	**Layanan Pengembangan Kompetensi ASN**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	105 Orang	208 Orang	198,10%	**3 Jenis**	**3 Jenis**
	1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	405 Orang	142 Orang	246 Orang	173,24%	70 Orang	92 Orang	131,43%
	2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	899 Orang	700 Orang	710 Orang	101,43%	145 Orang	378 Orang	260,69%
	3 Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	820 Orang	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	758 Orang	1.236 Orang	163,06%
		Tingkat Pelanggaran ASN yang Ditindaklanjuti							
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**71,65%**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**
	1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6508 Dokumen	4838 Dokumen	4506 Dokumen	71,54%	6299 Dokumen	4506 Dokumen	71,54%
	2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	60 Orang	62 Orang	3 Orang	100%	3 Orang	3 Orang	100%
	3 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	0	0	0	0	60 Orang	152 Orang	253,33%
	4 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	11 Orang	14 Orang	3 Orang	30%	10 Orang	3 Orang	30%
	5 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen	8 Dokumen	16 Dokumen	106,67%	15 Dokumen	16 Dokumen	106,67%
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang Dikembangkan Kompetensinya Sesuai Standar**							
	Pengembangan Kompetensi Teknis	**Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	0	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**2 Jenis**
	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	0	0	0	100%	272 orang	272 orang	100%
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Layanan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**121%**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
	1 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	105 Laporan	0	0	0	30 Laporan	30 Laporan	100%
	2 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan	100 Dokumen	100 Dokumen	242 Dokumen	242%	0	0	0
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**107,11%**	**107,11%**	**100,00%**
	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**174 Dokumen**	**29 Dokumen**	**29 Dokumen**	**29 Dokumen**	**100%**	**29 Dokumen**	**29 Dokumen**
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	15 Laporan	100%
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**99,10%**	**99,10%**	**100%**	**99,10%**
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37.175 Orang/Bulan	6378 Orang/Bulan	6147 Orang/Bulan	96,38%	6285 Orang/Bulan	6172 Orang/Bulan	98,20%
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	370 Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen	100%	70 Dokumen	70 Dokumen	100%
	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
	3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	380 Paket	0	0	0	0	0	0
	2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	85 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
	4 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	0	100%
	5 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	250 Pegawai	250 Orang	250 Orang	100%	0	0	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	168 Dokumen	168 Dokumen	100%	100%	78 Dokumen	78 Dokumen	100%
	6 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61 Laporan	61 Laporan	100%	100%	33 Laporan	33 Laporan	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan**	**90 Unit**	**27 Unit**	**48 Unit**	**177,78%**	**11 Unit**	**27 Unit**	**48 Unit**
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	100%	100%	0	0	100%
	2 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	22 Unit	200%	375%	4 Unit	15 Unit	375%
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	24 Unit	184,62%	214,29%	7 Unit	15 Unit	214,29%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**144 Laporan**	**24 Laporan**	**24 Laporan**	**100%**	**24 Laporan**	**24 Laporan**	**24 Laporan**
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**66 Unit**	**81 Unit**	**81 Unit**	**100%**	**81 Unit**	**81 Unit**	**100%**
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan., Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	100%	100%
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	100%
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	60 Unit	100%	45 Unit	45 Unit	100%	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BKPSDM KAB. ASAHAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kab. Asahan mempunyai pelayanan teknis di bidang kepegawaian dan kediklatan antara lain :

- Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Terkelolanya Informasi Kepegawaian ASN
- Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN
- Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN
- Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis
- Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Didukung oleh Pelayanan Penunjang antara lain :

- Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (tnn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	-	-	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	
1	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
2	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-	-	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	16 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	
3	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-	-	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	250 Dokumen	336 Dokumen	384 Dokumen	300 Dokumen	250 Dokumen	
4	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-	-	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	3 Lembaga	
5	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	
6	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-	-	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	
II	**Layanan Mutasi dan Promosi**	-	-	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	

7	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-	-	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	53 Dokumen	38 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	
8	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-	-	950 Dokumen	960 Dokumen	970 Dokumen	980 Dokumen	820 Dokumen	1322 Dokumen	970 Dokumen	980 Dokumen	
9	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-	-	12 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	16 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	
III	**Layanan Pengembangan Kompetensi ASN**	-	-	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	
10	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	-	-	105 Orang	70 Orang	65 Orang	60 Orang	208 Orang	92 Orang	65 Orang	60 Orang	
11	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-	-	142 Orang	145 Orang	148 Orang	151 Orang	246 Orang	378 Orang	148 Orang	151 Orang	
12	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	-	-	700 Orang	730 Orang	758 Orang	770 Orang	710 Orang	1236 Orang	758 Orang	770 Orang	
IV	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	-	-	**4 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	
13	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	6508 Dokumen	6299 Dokumen	6249 Dokumen	6199 Dokumen	4838 Dokumen	4506 Dokumen	6249 Dokumen	6199 Dokumen	
14	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-	-	60 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	62 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	
15	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	-	-	0	60 Orang	60 Orang	60 Orang	0	152 Orang	60 Orang	60 Orang	
16	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-	-	11 Orang	10 Orang	9 Orang	8 Orang	14 Orang	3 Orang	9 Orang	8 Orang	
17	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	-	-	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	8 Dokumen	16 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	

V	**Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN**	-	-	**0**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**0**	**1 Jenis**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	
18	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	0	272 Orang	275 Orang	280 Orang	0	272 Orang	15 Dokumen	15 Dokumen	
VI	**Layanan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN**	-	-	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**3 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	
19	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-	-	0	30 Laporan	25 Laporan	20 Laporan	0	30 Laporan	25 Laporan	20 Laporan	
20	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan	-	-	100 Dokumen	0	0	0	242 Dokumen	0	0	0	

VII	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	**29 Dokumen**	**29 Dokumen**	**29 Dokumen**	**29 Dokumen**	**29 Dokumen**	**29 Dokumen**	**29 Dokumen**	**29 Dokumen**	
21	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
22	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
23	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
24	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
25	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
26	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	
27	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
VIII	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
28	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	6142 Orang/ Bulan	6285 Orang /Bulan	6013 Orang/ Bulan	5761 Orang/ Bulan	42 Orang/ Bulan	6172 Orang/ Bulan	6013 Orang/ Bulan	5761 Orang/ Bulan	

29	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	70 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	
30	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	
31	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
IX	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	-	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
32	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
33	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
34	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
X	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
35	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	0	0	50 Paket	55 Paket	0	0	50 Paket	55 Paket	
36	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	
37	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	

38	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	0	0	0	
39	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	250 Orang	0	0	0	250 Orang	0	0	0	
XI	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
40	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
41	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
42	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
43	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
44	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	-	168 Dokumen	78 Dokumen	82 Dokumen	86 Dokumen	168 Dokumen	78 Dokumen	82 Dokumen	86 Dokumen	
45	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	
46	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
47	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	61 Laporan	33 Laporan	35 Laporan	37 Laporan	61 Laporan	33 Laporan	35 Laporan	37 Laporan	
XII	**Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan**	-	-	**26 Unit**	**11 Unit**	**12 Unit**	**13 Unit**	**14 Unit**	**30 Unit**	**12 Unit**	**13 Unit**	
48	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	2 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	

49	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	11 Unit	4 Unit	4 Unit	5 Unit	22 Unit	15 Unit	4 Unit	5 Unit	
50	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	13 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	24 Unit	15 Unit	7 Unit	7 Unit	
XIII	**Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	-	-	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	
51	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
52	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
XIV	**Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	-	-	**81 Unit**	**66 Unit**	**66 Unit**	**66 Unit**	**81 Unit**	**66 Unit**	**66 Unit**	**66 Unit**	
53	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	
54	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
55	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	60 Unit	45 Unit	45 Unit	45 Unit	60 Unit	45 Unit	45 Unit	45 Unit	

2.2.2. CAPAIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2022

Keadaan : Bulan Desember 2022

NO.	NAMA KEGIATAN/PROYEK	BIAYA MENURUT		REALISASI				KET.
		DPA OPD (Rp.)	KONTRAK/SWK. (Rp.)	FISIK		KEUANGAN		
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.112.048.805,00**	**9.112.048.805,00**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**14.282.400,00**	**14.282.400,00**					
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.282.400,00	14.282.400,00	13.994.400,00	100,00	13.994.400,00	97,78	
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.503.113,00	13.503.113,00	13.215.113,00	100,00	13.215.113,00	97,87	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**8.164.740.090,00**	**8.164.740.090,00**					
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.164.740.090,00	8.164.740.090,00	7.207.473.512,00	100,00	7.207.473.512,00	88,28	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**409.022.549,00**	**409.022.549,00**					
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.257.411,00	16.257.411,00	16.257.411,00	100,00	16.257.411,00	100,00	
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.639.888,00	103.639.888,00	103.454.020,00	100,00	103.454.020,00	99,82	
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.690.650,00	75.690.650,00	75.690.650,00	100,00	75.690.650,00	100,00	
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	68.581.100,00	68.581.100,00	68.071.500,00	100,00	68.071.500,00	99,26	
	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.375.000,00	12.375.000,00	10.960.000,00	100,00	10.960.000,00	88,57	
	6 Penyediaan Bahan/Material	11.576.500,00	11.576.500,00	11.379.000,00	100,00	11.379.000,00	98,29	
	7 Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.902.000,00	120.902.000,00	120.716.046,00	100,00	120.716.046,00	99,85	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**141.520.563,00**	**141.520.563,00**					
	1 Pengadaan Mebel	13.312.500,00	13.312.500,00	13.312.500,00	100,00	13.312.500,00	100,00	
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	128.208.063,00	128.208.063,00	127.757.750,00	100,00	127.757.750,00	99,65	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**228.891.893,00**	**228.891.893,00**					
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.532.569,00	72.532.569,00	56.027.303,00	100,00	56.027.303,00	77,24	
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.359.324,00	156.359.324,00	156.082.658,00	100,00	156.082.658,00	99,82	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**231.588.197,00**	**231.588.197,00**					
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan., Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.508.197,00	93.508.197,00	79.768.573,00	100,00	79.768.573,00	85,31	
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	91.500.000,00	91.500.000,00	90.711.720,00	100,00	90.711.720,00	99.14	

	Bangunan Lainnya							
	3 Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.580.000,00	46.580.000,00	46.090.000,00	100,00	46.090.000,00	100,00	
2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**2.652.398.768,00**	**2.652.398.768,00**					
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**1.363.859.943,00**	**1.363.859.943,00**					
	1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	22.733.275,00	22.733.450,00	21.328.104,00	100,00	21.328.104,00	93,82	
	2 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	158.616.430,00	158.616.430,00	144.045.193,00	100,00	144.045.193,00	90,81	
	3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	75.838.000,00	75.838.000,00	64.986.493,00	100,00	64.986.493,00	85,69	
	4 Fasilitas Lembaga Profesi ASN	958.606.988,00	958.606.988,00	945.519.788,00	100,00	945.519.788,00	98,63	
	5 Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian	79.465.000,00	79.465.000,00	65.489.015,00	100,00	65.489.015,00	82,41	
	6 Pengelolaan Data Kepegawaian	68.600.250,00	68.600.250,00	47.853.257,00	100,00	47.853.257,00	69,76	
	Mutasi dan Promosi ASN	**698.226.500,00**	**698.226.500,00**					
	1 Pengelolaan Mutasi ASN	65.000.000,00	65.000.000,00	51.709.917,00	100,00	51.709.917,00	79,55	
	2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	139.230.000,00	139.230.000,00	132.949.486,00	100,00	132.949.486,00	95,49	
	3 Pengelolaan Promosi ASN	493.996.500,00	493.996.500,00	361.921.592,00	100,00	361.921.592,00	73,26	
	Pengembangan Kompetensi ASN	**267.817.950,00**	**267.817.950,00**					
	1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	112.581.550,00	112.581.550,00	91.070.125,00	100,00	236.342.625,00	80,89	
	2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	40.948.500,00	40.948.500,00	31.563.648,00	100,00	31.563.648,00	77,08	
	3 Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	114.287.900,00	114.287.900,00	102.162.957,00	100,00	102.162.957,00	89,39	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**322.494.375,00**	**322.494.375,00**					
	1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	143.948.300,00	143.948.300,00	124.212.181,00	100,00	124.212.181,00	86,29	
	2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	58.503.200,00	58.503.200,00	55.101.259,00	100,00	55.101.259,00	94,19	
	3 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	37.953.250,00	37.953.250,00	32.120.744,00	100,00	32.120.744,00	84,63	
	4 Pembinaan Disiplin ASN	60.999.000,00	60.999.000,00	53.507.900,00	100,00	53.507.900,00	87,72	
	5 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	21.090.625,00	21.090.625,00	21.090.625,00	100,00	21.090.625,00	100,00	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**2.821.819.000,00**	**2.821.819.000,00**					
	Pengembangan Kompetensi Teknis	**190.002.500,00**	**190.002.500,00**					
	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	190.002.500,00	190.002.500,00	163.074.800,00	100,00	163.074.800,00	85,83	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**2.631.816.500,00**	**2.631.816.500,00**					
	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.631.816.500,00	2.631.816.500,00	2.330.935.182,00	100,00	2.330.935.182,00	88,57	
	JUMLAH	**14.677.766.573,00**	**14.677.766.573,00**	**13.050.502.610,00**	**100,00**	**13.050.502.610,00**	**88,91**	

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BKPSDM KAB. ASAHAN

Isu – isu strategis adalah sesuatu yang menjadi fokus utama perhatian dari BKPSDM Kab. Asahan, yaitu :

1. Belum semua jabatan memiliki standar kompetensi Jabatan;
2. Kebutuhan pegawai tidak sesuai dengan beban kerja;
3. Belum memiliki manajemen karir : perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
4. Belum memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
5. Belum memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan, Badan Kepegawaian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.4. REVIEW TERHADAP AWAL RKPD DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2024

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	VOLUME	APBD KAB (Rp.)
A.	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1.	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.801.000
b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.669.250
2.	**Administrasi Keuangan**		
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5761 Orang/Bulan	8.001.412.557
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42 Paket	29.400.000
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	12.138.020
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	76.811.475
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	52.406.800
d.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	47.180.023
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	82 Dokumen	14.688.000
f.	Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	50.000.000
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	100.000.000
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	34.840.000
b.	Pengadaan Mebel	5 Unit	35.358.536
c.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	150.000.000
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit	167.960.344
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	82.575.783
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	259.270.863
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	20 Unit	98.846.679

	Lapangan		
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	32.250.000
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45 Unit	41.775.323
B.	**Program Kepegawaian Daerah**		
1.	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		
a.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	32.733.275
b.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	14 Dokumen	168.616.850
c.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	300 Dokumen	85.838.000
d.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	835.971.850
e.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	19 Dokumen	125.196.000
f.	Pengelolaan Data Kepegawaian	19 Dokumen	90.000.000
2.	**Mutasi dan Promosi ASN**		
a.	Pengelolaan Mutasi ASN	40 Dokumen	135.000.000
b.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen	149.230.000
c.	Pengelolaan Promosi ASN	7 Dokumen	494.391.927
3.	**Pengembangan Kompetensi ASN**		
a.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	65 Orang	95.399.250
b.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	148 Orang	55.794.675
c.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	758 Orang	128.279.900
4.	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		
a.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.235 Dokumen	197.803.800
b.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	3 Orang	130.271.700
c.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	60 Orang	34.119.500
d.	Pembinaan Disiplin ASN	9 Orang	133.300.000
e.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	15 Dokumen	25.090.625
C.	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**		
1.	**Pengembangan Kompetensi Teknis**		
a.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	280 Orang	357.243.275
1.	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		
a.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	25 Laporan	2.872.062.500

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berhubung pada tahun 2024 tidak ada program dan kegiatan yang menyangkut langsung kepada masyarakat maka dalam hal ini tidak ada yang perlu ditelaah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dari Kebijakan Nasional dapat diambil beberapa program yang menjadi prioritas pembangunan dan berdasarkan kepada tupoksi Badan Kepegawaian Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. ASAHAN

Berdasarkan potensi, peluang, tantangan dan harapan wujud pembangunan kedepan, maka ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Asahan 2021 -2026 sebagai berikut:

"MASYARAKAT ASAHAN SEJAHTERA YANG RELIGIUS DAN BERKARAKTER"

Sedangkan misi yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan dalam mencapai visi tersebut adalah misi I yaitu :

"Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel"

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tujuan yang dirumuskan dalam rencana kerja BKPSDM adalah "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik"

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas, perlu dijabarkan ke dalam sasaran yang spesifik, terukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil serta memiliki batas waktu untuk mencapainya. Guna mewujudkan sasaran tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan sasaran yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah".

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan perencanaan program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan bahwa tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan adalah sebagaimana terlampir.

BAB. V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 merupakan gambaran rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan tahun 2024 berdasarkan pengamatan, pembahasan serta evaluasi program. Kami menyadari bahwa kesempurnaan kualitas hasil pembangunan bukan hanya ditentukan dari perencanaan yang handal tetapi juga oleh faktor tanggung jawab dari seluruh aparat, baik itu legislatif maupun masyarakat dalam mengemban Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Renstra Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026 yang akan menjadi tolok ukur pertanggungjawaban Bupati Asahan tiap tahunnya.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua guna mewujudkan Visi Kabupaten Asahan "*Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter*" dan terus melanjutkan pembangunan di segala bidang.

Kisaran, 26 Juli 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ASAHAN

NAZARUDDIN, S.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640615 199003 1 011

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. ASAHAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**15.464.727.780,00**							**15.543.930.254,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**15.464.727.780,00**							**15.543.930.254,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**12.235.422.005,00**							**12.213.180.254,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan***	-			**100 %**	**9.318.384.653,00**						-	**9.203.860.737,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			29 Dokumen	31.470.250,00			-	-	-	-	32.343.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	16.801.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	14.669.250,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.023.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	8.001.412.557,00			-	-	-	-	8.037.013.076,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5761 Orang/bulan	8.001.412.557,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.037.013.076,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	29.400.000,00			-	-	-	-	32.928.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	29.400.000,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.928.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	353.224.318,00			-	-	-	-	358.345.142,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.138.020,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.594.582,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	76.811.475,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		77.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	52.406.800,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		53.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	47.180.023,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				82 Dokumen	14.688.000,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.450.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	100.000.000,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Diadakan*	-			13 unit	388.158.880,00			-	-	-	-	196.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	34.840.000,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	35.358.536,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	167.960.344,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan*	-			12 Laporan	341.846.646,00			-	-	-	-	357.484.877,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	82.575.783,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		92.484.877,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	259.270.863,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		265.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara*	-			66 unit	172.872.002,00			-	-	-	-	189.746.642,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	98.846.679,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.708.280,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	32.250.000,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				45 Unit	41.775.323,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		46.788.362,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian***	**-**			**96,27 %**	**2.917.037.352,00**						-	**3.009.319.517,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	-			5 Jenis	1.338.355.975,00			-	-	-	-	1.383.384.140,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	32.733.275,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.661.268,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				14 Dokumen	168.616.850,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	-	-	-	-		188.850.872,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				300 Dokumen	85.838.000,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	835.971.850,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		835.972.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				19 Dokumen	125.196.000,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		131.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				19 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Layanan Mutasi dan Promosi*	-			3 Jenis	778.621.927,00			-	-	-	-	803.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				40 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		142.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1000 Dokumen	149.230.000,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		151.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				7 Dokumen	494.391.927,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		510.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Layanan Pengembangan Kompetensi ASN*	-			3 Jenis	279.473.825,00			-	-	-	-	290.830.037,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				65 Orang	95.399.250,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		98.140.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				148 Orang	55.794.675,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		62.490.037,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				758 Orang	128.279.900,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	-			5 Jenis	520.585.625,00			-	-	-	-	531.555.340,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				6235 Dokumen	197.803.800,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		198.240.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				3 Orang	130.271.700,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		132.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				60 Orang	34.119.500,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.213.840,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				9 Orang	133.300.000,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		135.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				15 Dokumen	25.090.625,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.101.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**3.229.305.775,00**							**3.330.750.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar***	-			**5,77 %**	**3.229.305.775,00**						-	**3.330.750.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN*	-			2 Jenis	357.243.275,00			-	-	-	-	358.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				280 Orang	357.243.275,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		358.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Layanan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN*	-			6 Jenis	2.872.062.500,00			-	-	-	-	2.972.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				25 Laporan	2.872.062.500,00	Kab. Asahan, Kota Kisaran Barat, Mekar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.972.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	JUMLAH							**15.464.727.780,00**							**15.543.930.254,00**	